

## **BAB 2**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian mengenai *tax avoidance* telah dilakukan sebelumnya. Adapun hasil ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

Penelitian dari jurnal yang dilakukan oleh (Praditasari & Setiawan, 2017) bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *good corporate governance*, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas pada *tax avoidance* dengan komponen *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, komite audit, dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, sedangkan *leverage* dan profitabilitas berpengaruh positif pada *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian dari jurnal yang dilakukan oleh (Fadhila *et al.*, 2017) bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kepemilikan manajerial, komisaris independen dan komite audit terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014. Teknik pemilihan sampel menggunakan *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh sebanyak 11 perusahaan, dengan metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan komite audit memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dari jurnal internasional yang dilakukan oleh (Jamei, 2017) bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara mekanisme tertentu *corporate governance* dan *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock*

*Exchange* selama tahun 2011-2015. Dalam hal ini, efek dari beberapa indeks *corporate governance* (anggota dewan, anggota *non-duty*, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional) pada *tax avoidance* diselidiki. Sampel terdiri dari 104 perusahaan yang terdaftar di *Tehran Stock Exchange*. *Eviews software* digunakan untuk menganalisis data dan regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara anggota dewan, anggota *non-duty*, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan *tax avoidance*.

Penelitian dari jurnal yang dilakukan oleh (Fitria, 2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, komisari independen, karakteristik eksekutif dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan 8 perusahaan yang terdaftar di Sektor Perdagangan di Bursa Efek Indonesia 2014-2017. Penelitian ini menggunakan 32 data laporan keuangan dari Bursa Efek Indonesia dengan regresi berganda dan proses dengan SPSS 23. Hasilnya secara parsial, kepemilikan institusional, independen dari Dewan Direktur, karakteristik eksekutif tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dari jurnal yang dilakukan oleh (Arianandini & Ramantha, 2018) bertujuan menguji pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini difokuskan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2016 dengan populasi 157 perusahaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode *purposive sampling*, sehingga diperoleh sampel sebanyak 39 perusahaan manufaktur. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda dan metode pengujian hipotesis menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif pada *tax avoidance*, *leverage* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

Penelitian dari jurnal internasional yang dilakukan oleh (Irianto *et al.*, 2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dan rasio intensitas modal terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2013-2015. Populasi yang diambil sebagai objek pengamatan berjumlah 156 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013-2015. Penentuan sampel dilakukan dengan menerapkan metode *purposive sampling* dan memperoleh sampel sebanyak 36 perusahaan manufaktur berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Sementara *leverage*, profitabilitas dan rasio intensitas modal tidak secara signifikan mempengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian dari jurnal internasional yang dilakukan oleh (Khuong *et al.*, 2019) bertujuan untuk menyelidiki dampak *tax avoidance* terhadap kepemilikan kas perusahaan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar saham Vietnam. Sampel terdiri dari 125 data perusahaan non-keuangan pada 2010-2016, dengan total 875 pengamatan. Investigasi menggunakan tiga langkah *tax avoidance* yang berbeda untuk menguji ketahanan hasil penelitian dan menggunakan estimator GMM untuk menguji hipotesis. Penelitian ini memastikan bukti empiris bahwa *tax avoidance* memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kepemilikan kas perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Vietnam. Tiga pengukuran *tax avoidance* menyajikan kesimpulan yang sama dengan hasil regresi.

Penelitian dari jurnal yang dilakukan oleh (Merslythalia & Lasmana, 2016) bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, komisaris independen, dan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 hingga 2014 dengan jumlah 141 perusahaan dengan penentuan sampel yang dipilih dalam penelitian menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 49 perusahaan yang memenuhi target populasi yang ditetapkan dalam penelitian. Berdasarkan hasil uji analisis linier berganda dengan tingkat signifikansi 5,5% maka hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kompetensi eksekutif, ukuran perusahaan, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) dalam (Susanto & Ramadhani, 2016) teori agensi adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pemilik usaha (*principal*) dan manajemen dari suatu usaha (*agent*). Dimana para *principal* akan memberikan wewenangnya kepada *agent* untuk mengelola perusahaannya dan juga dalam mengambil keputusan. Hubungan keagenan didalam teori agensi (*agency theory*) yaitu perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Teori agensi dapat menimbulkan asimetri informasi antara manajer (*agent*) dan pemilik usaha (*principal*) karena manajer mengetahui lebih banyak informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan para pemilik usaha. Dengan adanya asimetri informasi ini akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi penting yang tidak diketahui *principal* dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya (*agent*). Perbedaan kepentingan seperti adanya *pressure*, *opportunity*, *rationalization* dan *capability* yang menyebabkan *agent* melakukan tindakan menyimpang dan akan menimbulkan biaya keagenan (*agency cost*).

Masalah agensi yang berupa asimetri informasi ini juga akan terjadi ketika pemerintah sebagai pemungut pajak menginginkan adanya pemasukan bagi negara dari pemungutan pajak dengan jumlah yang tinggi. Sementara itu pihak manajer (*agent*) lebih berfokus kepada pemenuhan kepentingan pribadi mereka dengan melakukan kecurangan-kecurangan untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dengan mengefisiensikan beban yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk juga beban pajak atau dengan kata lain perusahaan akan mengupayakan untuk membuat perencanaan pajak baik dengan cara *tax evasion* atau *tax avoidance* yang memiliki tujuan agar pajak yang dibayarkan dapat seminimal mungkin dan dapat menghasilkan laba setelah pajak yang tinggi.

Asimetri informasi menurut (Scott, 2000) menyatakan terdapat dua macam, yaitu:

- 1) *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
- 2) *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

### **2.2.2. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009) dalam (Zahirah, 2017). Pihak manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan karena akan berdampak langsung pada dirinya selaku pemegang saham. Sehingga dengan bertambahnya jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, begitupun sebaliknya. Penyebabnya adalah kepemilikan saham oleh manajer akan cenderung membuat manajer mempertimbangkan kelangsungan perusahaannya sehingga manajer tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan (Pramudito dan Sari, 2015).

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu *instrument* atau alat yang digunakan untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap sebuah perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah yang ada di perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial maka manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dalam hal ini akan berdampak baik

kepada perusahaan serta memenuhi keinginan para pemegang saham (Thesarani, 2017).

Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham yang dimiliki dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Pujiati dan Widanar, 2009) dalam (Sihaloho dan Pratomo, 2014). Semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen maka akan mengurangi perilaku manajer yang mementingkan kepentingan pribadi. Kepemilikan manajerial akan memberi motivasi kepada manager untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

Menurut (Zahirah, 2017), perhitungan kepemilikan manajerial (MNJR) dihitung dengan rumus:

$$MNJR = \frac{\text{Jumlah Saham Manajerial}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

### 2.2.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri dan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan seharusnya memainkan peranan penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Sehingga semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki pihak institusi akan menyebabkan semakin besar tekanan yang diperoleh pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar dapat memaksimalkan laba perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional pada akhir tahun yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki investor institusional dalam perusahaan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Thesarani, 2017).

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi *intern* (Fadhilah, 2014). Kepemilikan institusional (INST) dapat dihitung dengan rasio:

$$INST = \frac{\text{Jumlah Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}}$$

#### 2.2.4. *Leverage*

Menurut (Ariawan *et al.*, 2017), *leverage* adalah tingkat hutang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada suatu periode yang disebut juga *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. Rasio *financial leverage* digunakan untuk mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah dibiayai oleh penggunaan hutang.

Menurut Fahmi (2012:62) dalam (Budiasih & Amani, 2019), rasio *leverage* adalah mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang. Rasio *leverage* berguna untuk mengetahui berapa besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana yang berasal dari milik perusahaan (aset perusahaan). Rasio *leverage* juga menunjukkan seberapa tinggi risiko yang dihadapi perusahaan. Semakin tinggi *Debt to Equity Ratio*, risiko perusahaan juga relatif tinggi karena perusahaan dalam melakukan operasinya menggunakan hutang dan perusahaan memiliki kewajiban untuk membayar bunga atas hutang, para investor cenderung menghindari untuk membeli saham-saham yang memiliki nilai *Debt to Equity Ratio* yang tinggi.

Menurut (Budiasih & Amani, 2019), perhitungan *leverage* dihitung dengan rumus:

$$DER = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Equity}} \times 100\%$$

#### 2.2.5. *Ukuran Perusahaan (Firm Size)*

Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2014), ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva, dan lainnya. Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total aset perusahaan. Semakin besar total aset maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil.

(Larasati, 2019) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan merupakan perbandingan skala yang mengukur besar atau kecilnya perusahaan berdasarkan aset. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan sebagai proses bisnis atau pengelolaan bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan. Besarnya aset dijadikan sebagai tolak ukur bagi *principal* dalam melakukan kegiatan investasi.

(Hormati, 2009) dalam (Dewi dan Jati, 2014) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu perusahaan ke dalam kategori besar atau kecil berdasarkan total aset, *log size*, dan sebagainya. Keputusan Ketua Bapepam No.Kep.11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus miliar, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus miliar (Ani Yuliyanti, 2011) dalam (Indriani, 2014).

Menurut (Budiasih & Amani, 2019), perhitungan *firm size* dihitung dengan rumus:

$$SIZE = \text{Log natural Total Assets}$$

#### **2.2.6. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)**

*Tax avoidance* merupakan kegiatan penghindaran pajak dengan menuruti aturan yang ada. Artinya *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak namun tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. *Tax avoidance* adalah salah satu hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan kas negara (Bactiar, 2015). *Tax avoidance* merupakan suatu usaha perusahaan untuk memperkecil jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan cara berusaha memperkecil laba perusahaan (Rahmawati *et al.*, 2016).

Upaya manajemen perusahaan untuk memperoleh laba yang diharapkan melalui penerapan manajemen pajak salah satunya adalah melalui penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan cara yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Penghindaran pajak dapat

juga didefinisikan sebagai suatu bagian dari strategi manajemen pajak yang tidak dilarang dalam undang-undang pajak.

Menurut (Sandy & Lukviarman, 2015), perhitungan *tax avoidance* dihitung dengan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

## 2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

### 2.3.1. Hubungan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Christiawan dan Tarigan, 2017). Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, pihak manajemen akan membuat manajer menjadi sangat hati-hati dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Dalam teori agensi disebutkan bahwa, semakin tinggi kepemilikan saham oleh manajer, maka dapat mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Selain itu, peningkatan kepemilikan manajerial untuk menyetarakan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan persentase kepemilikan tersebut dapat membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham serta meningkatkan pengawasan akan jalannya kegiatan ekonomi diperusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Pramudito dan Sari, 2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial secara negatif berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jumlah kepemilikan saham oleh manajerial dapat menurunkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Jika persentase kepemilikan atas saham diperusahaan semakin besar, maka keterlibatan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance* akan semakin kecil. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

H<sub>1</sub> : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### 2.3.2. Hubungan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dan dana perwalian serta institusi lainnya. Institusi-institusi tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan atas kinerja manajemen (Ngadiman dan Puspitasari, 2014). Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual (Zahirah, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maharani dan Suardana, 2014) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. ETR merupakan alat ukur dari *tax avoidance*, dimana ETR dan tindakan penghindaran pajak memiliki hubungan yang terbalik, dimana semakin rendah nilai ETR semakin agresif tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

H<sub>2</sub> : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### 2.3.3. Hubungan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

*Leverage* adalah rasio yang mengukur kemampuan utang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aset perusahaan. Semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Sehingga semakin tinggi nilai *leverage* maka tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan akan semakin tinggi (Zahirah, 2017).

H<sub>3</sub> : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

### 2.3.4. Hubungan *Firm Size* Terhadap *Tax Avoidance*

*Firm size* dapat dilihat dari total aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula *firm size* tersebut, sehingga perusahaan mampu menghasilkan laba yang besar. Dengan demikian, perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah besar. Perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan membebaskan biaya penyusutan atas aset yang dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan tersebut maka akan semakin banyak aset

yang dimiliki sehingga biaya penyusutan menjadi besar dan perusahaan membayar pajak dengan jumlah kecil.

$H_4$  : *Firm Size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

#### 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Dalam penelitian ini kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, *leverage* dan *firm size* adalah sebagai variabel bebas, sedangkan *tax avoidance* adalah variabel terikat. Maka hubungan antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

